

KEBIJAKAN KONSERVASI LAUT DI WAKATOBI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS CAGAR BIOSFER UNESCO

Marissa Safira Dinanti¹, Atika Puspita Marzaman²

^{1,2}Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2024

Revised November 2024

Accepted November 2024

Available online Oktober 2024

Korespondensi: Email :

¹marissasafira24@gmail.com,

²tika.marzaman@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

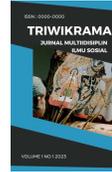
ABSTRAK

This study examines the gap between marine conservation policies and their implementation concerning the UNESCO Biosphere Reserve status in Wakatobi, as well as the role of local community involvement in the success of marine conservation. Utilizing the sustainable development theory and global governance theory, this research explores how marine conservation are applied at the local level and the impact of community involvement on the sustainability of marine ecosystems. Data were obtained through a qualitative literature review method by examining various sources related to conservation policies and area management. The findings indicate that although the ineffectiveness of marine conservation policy implementation in Wakatobi does not immediately revoke UNESCO status, ecosystem degradation and lack of community support can reduce the management quality to a point that may no longer meet UNESCO standards. This could potentially put Wakatobi's Biosphere Reserve status at risk if improvements in coordination, law enforcement, and community involvement are not implemented promptly. This study highlights the importance of collaborative governance between the government, international organizations, and the community to maintain conservation effectiveness and uphold Wakatobi's Biosphere Reserve status.

Keywords: UNESCO Biosphere Reserve, Wakatobi, marine conservation, global governance, sustainable development.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara kebijakan konservasi laut dan implementasinya terhadap status Cagar Biosfer UNESCO di Wakatobi, serta peran keterlibatan masyarakat lokal dalam keberhasilan konservasi laut. Dengan pendekatan teori pembangunan berkelanjutan dan tata kelola global, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan konservasi laut diterapkan di tingkat lokal dan dampak keterlibatan masyarakat terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Data diperoleh melalui metode kualitatif berbasis kajian pustaka, dengan menelaah berbagai sumber literatur terkait kebijakan konservasi dan manajemen kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketidakefektifan implementasi



kebijakan konservasi laut di Wakatobi tidak serta-merta mencabut status UNESCO, kerusakan ekosistem dan kurangnya dukungan masyarakat dapat menurunkan kualitas manajemen kawasan hingga tidak lagi memenuhi standar UNESCO. Hal ini berpotensi menempatkan status Cagar Biosfer Wakatobi dalam risiko jika tidak segera diperbaiki melalui penguatan koordinasi, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat yang lebih baik. Penelitian ini menyoroti pentingnya tata kelola yang kolaboratif antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat untuk menjaga efektivitas konservasi dan mempertahankan status Cagar Biosfer Wakatobi.

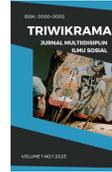
Kata kunci: Cagar Biosfer UNESCO, Wakatobi, konservasi laut, tata kelola global, pembangunan berkelanjutan.

1. LATAR BELAKANG

Wakatobi, salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Wakatobi adalah akronim dari empat pulau utama, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Perairan Kepulauan Wakatobi berada di wilayah *Coral Triangle* atau "Segitiga Terumbu Karang", yang merupakan pusat keanekaragaman terumbu karang dan hayati tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia menetapkan daerah ini sebagai Taman Nasional Wakatobi melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 393/Kpts-VI/1996 dan dikuatkan lagi oleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 7651/Kpts-II/2002 pada 19 Agustus 2002 dengan mencakup area seluas 1.390.000 hektar. Setelah dinyatakan sebagai Taman Nasional, pada Juli 2012, UNESCO sebagai Badan PBB yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, secara resmi menetapkan kawasan Taman Nasional Wakatobi sebagai salah satu dari 621 Cagar Biosfer di dunia yang tersebar di 117 negara (Kemenhut, 2012).

Penetapan sebagai Cagar Biosfer UNESCO merupakan pengakuan atas kekayaan keanekaragaman hayati Wakatobi dan keunikan wilayah yang tidak dimiliki daerah lain. Status internasional ini memberikan pengakuan global atas peran vital Wakatobi dalam menjaga kelestarian lingkungan laut, serta memberikan peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan di tingkat internasional. Sebagai bagian dari Cagar Biosfer Dunia, Wakatobi tidak hanya menjadi objek konservasi alam tetapi juga berperan sebagai laboratorium hidup untuk penelitian ilmiah, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Wakatobi diakui tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga karena peran ekologis dan ilmiah yang sangat penting dalam ekosistem laut global (Adimu et al., 2018).

Menurut Hugua, Bupati Wakatobi, ada tiga kepentingan yang dilindungi UNESCO dalam menetapkan Taman Nasional Wakatobi sebagai pusat cagar biosfer dunia tersebut, yaitu kearifan lokal masyarakat Wakatobi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Kearifan lokal yang dimaksud berkaitan dengan tradisi budaya masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan alam secara bijaksana. Pelestarian lingkungan penting karena perairan Taman Nasional Wakatobi memiliki keragaman terumbu karang dan biota laut yang sangat tinggi

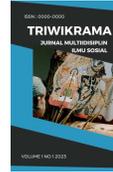


dibandingkan wilayah lain di dunia, dengan 750 dari total 850 spesies terumbu karang dunia ditemukan di sana. Sebagai perbandingan, Laut Karibia hanya memiliki 50 spesies, sedangkan Laut Merah memiliki 300 spesies. Untuk kepentingan ekonomi, Hugua menekankan perlunya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan oleh masyarakat tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Menurutnya, ketiga aspek ini menjadi alasan utama UNESCO menetapkan kawasan Taman Nasional Wakatobi sebagai pusat cagar biosfer dunia (Utomo, 2012).

Dalam upaya pelestarian sumber daya laut di Wakatobi, kebijakan konservasi laut disusun dan dijalankan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Kebijakan konservasi laut di Wakatobi, seperti di banyak kawasan konservasi lainnya di Indonesia, umumnya ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berperan sebagai otoritas utama dalam pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi. Kebijakan tersebut kemudian dilengkapi dengan aturan-aturan spesifik dari pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan di lapangan yang sesuai dengan kondisi lokal. Meskipun kebijakan konservasi telah dirancang secara ideal melalui berbagai peraturan dan zonasi, pelaksanaan di lapangan sering kali terhambat oleh lemahnya koordinasi antara otoritas pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pengawasan yang memadai. Selain itu, keberhasilan konservasi laut tidak hanya tergantung pada kebijakan formal tetapi juga peran dari masyarakat lokal, yang kehidupan ekonominya sangat bergantung pada sumber daya laut (Syukur, 2015).

Jika suatu daerah sudah mendapatkan status Cagar Biosfer, maka masyarakat dan pemerintah wajib mempertahankan gelar tersebut, begitu juga dengan Wakatobi. Keterlibatan masyarakat lokal, khususnya komunitas nelayan tradisional seperti Suku Bajo, menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan konservasi laut di Wakatobi (Diyati et al, 2018). Banyak kebijakan konservasi laut yang sering kali dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, yang merasa terbatas aksesnya terhadap sumber daya laut yang menjadi sumber penghidupan utama mereka. Oleh karena itu, keberhasilan konservasi sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, karena dengan pendekatan yang kolaboratif, masyarakat merasa lebih memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian sumber daya di sekitarnya (Cuong et al., 2018).

Mengenai status Cagar Biosfer UNESCO, pada dasarnya status ini bukan hanya pengakuan secara simbolis, tetapi mengandung komitmen untuk menjalankan prinsip konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan secara seimbang. Cagar Biosfer ditetapkan melalui Program MAB antar pemerintah oleh Direktur Jenderal UNESCO berdasarkan keputusan Dewan Koordinasi Internasional MAB (MAB-ICC). Status ini diakui secara internasional, dan Negara Anggota dapat mengajukan lokasi melalui proses penetapan resmi. Program MAB (Man and Biosphere) merupakan inisiatif utama UNESCO dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Program ini dilaksanakan dengan arahan dari Negara



Anggota UNESCO, dengan badan pengatur utamanya adalah Dewan Koordinasi Internasional MAB (MAB-ICC) (UNESCO, 2023).

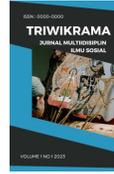
Status Cagar Biosfer Dunia diberikan kepada kawasan-kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi serta berperan penting dalam melindungi ekosistem melalui pendekatan berbasis manusia. Kawasan seperti Wakatobi mendapatkan pengakuan sebagai Cagar Biosfer berdasarkan kemampuan untuk mengelola keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, dan pemberdayaan sosial-ekonomi setempat. Namun, jika kebijakan konservasi di Wakatobi tidak diimplementasikan secara efektif, ini dapat memengaruhi kualitas ekosistem, yang pada akhirnya bisa berdampak pada penilaian UNESCO terhadap status Cagar Biosfernya.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam ilmu hubungan internasional, terdapat konsep-konsep yang relevan dalam memahami kebijakan konservasi laut dan peran strategis negara-negara dalam melindungi sumber daya alam maritim. Kebijakan konservasi laut tidak hanya terkait dengan aspek lingkungan, tetapi juga berhubungan erat dengan politik internasional, kerjasama lintas batas, dan komitmen terhadap perjanjian global. Dalam konteks pengelolaan Wakatobi sebagai Cagar Biosfer UNESCO, beberapa teori utama yang dapat digunakan untuk memahami dinamika ini meliputi teori pembangunan berkelanjutan dan teori manajemen kawasan perlindungan laut. Kedua teori ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan ekologi dan sosial, tetapi juga menjelaskan peran penting kebijakan maritim dalam hubungan internasional dan upaya konservasi laut.

A. Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*)

Teori Pembangunan Berkelanjutan, yang diperkenalkan oleh *Brundtland Commission* dalam laporan *Our Common Future* (1987), menjadi fondasi penting dalam pendekatan kebijakan lingkungan global, termasuk dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi laut. Teori ini menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks kebijakan konservasi laut, pembangunan berkelanjutan mencakup perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati sembari mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Hal ini sangat relevan di kawasan Cagar Biosfer Wakatobi, di mana terumbu karang yang kaya akan keanekaragaman hayati laut harus dilindungi sambil mengakomodasi sektor ekonomi lokal seperti perikanan dan pariwisata bahari yang berkelanjutan. Penerapan teori ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga mendukung mata pencaharian masyarakat setempat yang bergantung pada laut sebagai sumber daya utama.



Pada tingkat internasional, konsep pembangunan berkelanjutan juga menjadi prinsip utama dalam berbagai perjanjian global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDG), khususnya SDG 14 yang berfokus pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari sumber daya laut. Dalam implementasinya, negara-negara anggota, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan maritim mereka, guna melindungi ekosistem laut dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Oleh karena itu, teori ini menuntut pendekatan holistik yang mencakup pengelolaan sumber daya secara hati-hati, pengembangan ekonomi lokal yang bertanggung jawab, serta pelibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi.

B. Teori Tata Kelola Global (*Global Governance Theory*)

Teori Tata Kelola Global (*Global Governance Theory*) adalah pendekatan dalam ilmu hubungan internasional yang menyoroti pentingnya koordinasi dan kerja sama lintas batas negara untuk menangani isu-isu global yang kompleks, seperti perubahan iklim, konservasi lingkungan, dan keamanan internasional. Tata kelola global mengacu pada mekanisme, kebijakan, aturan, serta proses kolaboratif yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional, termasuk negara-negara, organisasi internasional (seperti PBB dan UNESCO), sektor swasta, dan masyarakat sipil. Melalui pendekatan ini, teori tata kelola global berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan otoritas berbeda dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam isu-isu global (Rosenau, 1992).

Dalam konteks konservasi lingkungan, teori tata kelola global memberikan pemahaman tentang peran organisasi internasional dan kebijakan multilateral dalam menjaga keseimbangan ekologis di wilayah-wilayah yang penting secara global, seperti kawasan Cagar Biosfer. Misalnya, penetapan Wakatobi sebagai Cagar Biosfer UNESCO menunjukkan bahwa kawasan ini tidak hanya menjadi perhatian lokal atau nasional, tetapi juga menjadi tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi dan melestarikannya. Dalam hal ini, UNESCO berperan sebagai lembaga pengawas dan fasilitator yang membantu memandu dan mendukung upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah lokal dan nasional, serta memastikan bahwa standar konservasi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi global. Dalam konteks Wakatobi, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana standar konservasi yang ditetapkan UNESCO berupaya diimplementasikan di tingkat lokal, serta untuk melihat peran UNESCO dalam mengawasi, mendukung, atau mengevaluasi efektivitas konservasi di kawasan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk menganalisis kebijakan konservasi laut di Wakatobi dan implikasinya terhadap status Cagar Biosfer UNESCO. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, laporan, dan dokumen terkait yang membahas kebijakan konservasi laut, pengelolaan kawasan konservasi, serta studi kasus implementasi kebijakan di Wakatobi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan melalui *database* akademik dan publikasi terpercaya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama, perdebatan teoretis, serta temuan empiris dari penelitian terdahulu. Analisis dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan konservasi yang efektif serta implikasinya terhadap pelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat di Wakatobi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kesenjangan antara Kebijakan Konservasi Laut dan Implementasinya di Wakatobi

Konservasi laut di Wakatobi bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Kebijakan-kebijakan ini, meskipun secara prinsip ideal, sering kali mengalami tantangan dalam implementasinya. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua otoritas utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Wakatobi, namun koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak ini sering kali tidak berjalan dengan baik, sehingga menghambat keberlanjutan kawasan konservasi tersebut (Adimu et al., 2018). Kesenjangan antara kebijakan konservasi laut di Wakatobi dan implementasinya di lapangan menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat upaya pelestarian lingkungan laut dan optimalisasi peran Wakatobi sebagai Cagar Biosfer UNESCO. Meskipun secara formal kawasan ini telah diakui secara internasional dan diposisikan sebagai salah satu cagar biosfer dunia, masalah mendasar muncul dalam bentuk lemahnya pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan, kurangnya keterlibatan masyarakat lokal, serta ketidakselarasan antara tujuan konservasi dan kepentingan ekonomi setempat. Kesenjangan ini menimbulkan tantangan dalam mengharmoniskan tujuan konservasi dengan kepentingan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah minimnya adaptasi kebijakan konservasi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal, seperti yang tercermin dalam penelitian yang menyoroti ketidakcocokan antara rencana pengelolaan Taman Nasional Wakatobi dan kebutuhan masyarakat Bajo (Elliott et al., 2001).

Salah satu aspek yang sering dikemukakan dalam berbagai penelitian adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan Taman Nasional Wakatobi. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan ini, sementara pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengelola pembangunan ekonomi lokal, termasuk sektor pariwisata. Namun, sering kali terjadi tumpang tindih peran dan ketidakjelasan tanggung



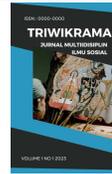
jawab antara dua otoritas ini. Akibatnya, kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat sering kali tidak diimplementasikan secara optimal di lapangan, atau bahkan bertentangan dengan kepentingan pembangunan lokal yang lebih fokus pada ekonomi pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini diperkuat oleh temuan Adimu et al. (2018) yang menegaskan pentingnya koordinasi antarotoritas untuk memastikan kelestarian kawasan konservasi, yang selama ini seringkali menjadi titik lemah dalam pengelolaan kawasan laut di Wakatobi (Adimu et al., 2018).

Masalah lain yang muncul adalah kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan konservasi. Wakatobi adalah rumah bagi komunitas Suku Bajo, yang secara tradisional sangat bergantung pada laut sebagai sumber kehidupan. Namun, kebijakan yang diterapkan sering kali tidak memperhitungkan kebutuhan dan kearifan lokal mereka, yang menyebabkan resistensi dari masyarakat setempat. Banyak nelayan lokal, terutama komunitas Bajo, menolak kebijakan yang mereka anggap membatasi akses mereka terhadap sumber daya laut tanpa memberikan alternatif ekonomi yang memadai. Mereka tetap mengakses sumber daya laut secara diam-diam sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak adil dan tidak mendukung kesejahteraan mereka (Lynch & Turner, 2021).

Kurangnya dukungan ekonomi bagi masyarakat nelayan ini semakin memperparah kondisi. Meskipun terdapat program-program yang dirancang untuk membantu mereka beralih ke sektor yang lebih berkelanjutan, seperti budidaya ikan dan ekowisata, banyak program ini tidak berjalan dengan baik. Inisiatif ekowisata yang melibatkan komunitas Bajo tidak didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang memadai, sehingga nelayan masih tetap bergantung pada metode penangkapan tradisional yang sering kali tidak berkelanjutan. Selain itu, ketidakterersediaan pasar dan akses yang terbatas ke teknologi modern menjadi penghalang utama bagi mereka untuk beradaptasi dengan kebijakan konservasi yang lebih ramah lingkungan (Marlina et al., 2020).

Selain dari aspek ekonomi dan sosial, penegakan hukum yang lemah juga menjadi faktor signifikan yang berkontribusi terhadap kesenjangan implementasi kebijakan. Meskipun Wakatobi memiliki status cagar biosfer, berbagai praktik penangkapan ikan ilegal dan aktivitas destruktif lainnya, seperti penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, masih terus berlangsung. Kurangnya pengawasan yang efektif di lapangan menyebabkan aturan konservasi tidak diindahkan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan logistik untuk mendukung penegakan hukum di kawasan seluas ini, serta ketidakjelasan dalam sanksi bagi para pelanggar. Akibatnya, pelanggaran terhadap aturan konservasi sering kali tidak mendapatkan tindak lanjut yang tegas, sehingga mendorong perilaku ilegal tetap berlanjut (Tam, 2015).

Di sisi lain, sektor pariwisata di Wakatobi yang berkembang pesat juga membawa tantangan tersendiri. Wakatobi telah menjadi salah satu destinasi wisata bahari terkemuka di Indonesia, yang menawarkan keindahan terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut



yang luar biasa. Namun, perkembangan pariwisata yang tidak terkontrol menambah tekanan pada ekosistem laut. Kerusakan terumbu karang akibat aktivitas wisata, seperti snorkling dan menyelam yang tidak teratur, semakin memperburuk kondisi ekosistem laut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas wisatawan, serta minimnya edukasi tentang praktik pariwisata berkelanjutan. Meskipun pariwisata membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, tanpa perencanaan yang matang, potensi jangka panjang dari ekowisata berkelanjutan dapat terancam (Yulius et al., 2015).

Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif, di mana masyarakat lokal harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan konservasi. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu memperkuat koordinasi mereka, sehingga kebijakan konservasi yang dirumuskan dapat berjalan secara harmonis dengan tujuan pembangunan ekonomi lokal. Di sisi lain, pengawasan lapangan harus ditingkatkan melalui penambahan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar aturan konservasi.

Menurut penelitian Kenchington dan Agardy (1990), program cagar biosfer UNESCO didasarkan pada manajemen konservasi berkelanjutan, terutama di ekosistem laut, di mana intervensi manusia yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif pada kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Cagar biosfer laut memerlukan pengaturan yang menekankan pengelolaan dampak manusia dalam kapasitas ekosistem. Dalam konteks Wakatobi, lemahnya implementasi kebijakan, seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal serta pengelolaan pariwisata yang tidak terkontrol, dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut lainnya. Apabila praktik-praktik ini dibiarkan, ekosistem yang rusak tidak akan mampu memenuhi kriteria keberlanjutan yang diharapkan dari sebuah cagar biosfer, yang dapat memicu evaluasi ulang statusnya oleh UNESCO (Kenchington & Agardy, 1990).

Lebih lanjut, program cagar biosfer bertujuan tidak hanya untuk melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Dalam banyak kasus, pengelolaan kawasan konservasi sering kali menghadapi tantangan yang berhubungan dengan konflik kepentingan antara tujuan konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal. Kegagalan untuk mengelola konflik ini secara efektif dapat mengurangi dukungan masyarakat terhadap kebijakan konservasi. Dalam jangka panjang, ketidakharmonisan antara kebutuhan lokal dan tujuan konservasi dapat melemahkan kualitas pengelolaan kawasan, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi status UNESCO kawasan tersebut jika kawasan tidak lagi memenuhi standar keberlanjutan yang diharapkan (Nguyen et al., 2020).

Secara keseluruhan, ketidakefektifan implementasi kebijakan konservasi laut di Wakatobi memang tidak serta-merta mencabut status UNESCO. Namun, kerusakan ekosistem dan kurangnya dukungan masyarakat dapat menurunkan kualitas manajemen

kawasan hingga tidak lagi memenuhi standar UNESCO. Hal ini berpotensi menempatkan status cagar biosfer Wakatobi dalam risiko jika tidak segera diperbaiki melalui penguatan koordinasi, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat yang lebih baik.

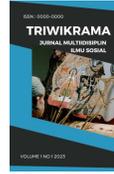
4.2 Peran Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Keberhasilan Kebijakan Konservasi Laut

Wakatobi pada Juli 2012 terpilih sebagai Cagar Biosfer Dunia oleh UNESCO adalah tidak lepas dari peran serta masyarakat adatnya (Diyati, et al., 2018). Keterlibatan masyarakat lokal, khususnya nelayan dan komunitas pesisir seperti Suku Bajo, sangat penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan konservasi laut di Wakatobi. Sebagai komunitas yang secara historis sangat bergantung pada laut, mereka memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kebijakan, terutama karena kehidupan sehari-hari mereka sangat terikat dengan laut sebagai sumber penghidupan. Meskipun demikian, tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan konservasi laut di Wakatobi adalah kurangnya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, yang sering kali mengarah pada resistensi dan pelanggaran aturan konservasi.

Kebijakan konservasi di Wakatobi sering kali tidak memperhitungkan aspek-aspek sosial-ekonomi masyarakat lokal, terutama bagi kelompok nelayan minoritas. Mereka sering merasa terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan, yang dianggap lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) tanpa masukan yang cukup dari masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan resistensi terhadap kebijakan yang diberlakukan, karena masyarakat lokal menganggap kebijakan tersebut membatasi akses mereka ke sumber daya laut yang mereka andalkan untuk hidup. Dalam kasus Wakatobi, komunitas Bajo merasa bahwa penerapan kawasan konservasi mengurangi kemampuan mereka untuk mencari nafkah, dan mereka seringkali melanggar aturan karena tidak ada alternatif ekonomi yang memadai yang disediakan oleh pemerintah (Lynch & Turner, 2021).

Selain itu, pendekatan konservasi yang diterapkan di Wakatobi seringkali terlalu berfokus pada perlindungan lingkungan laut tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal. Rencana zonasi Taman Nasional Wakatobi tidak sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan ekonomi masyarakat Bajo dan komunitas lain yang tinggal di wilayah tersebut. Zonasi yang ketat dan pembatasan akses sering kali mengabaikan realitas hidup masyarakat yang telah hidup bergantung pada sumber daya laut selama berabad-abad. Kegagalan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap aturan konservasi yang diberlakukan, dan pada akhirnya, kebijakan tersebut tidak efektif (Elliott et al., 2001).

Lebih lanjut, salah satu penyebab kegagalan partisipasi masyarakat dalam kawasan konservasi laut di Wakatobi adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak pengelola dan masyarakat nelayan. Konsultasi publik yang dilakukan sebelum kebijakan diterapkan sering kali tidak memperhitungkan ritme kehidupan masyarakat nelayan, yang memiliki pola hidup dan bekerja yang berbeda dengan otoritas pengelola kawasan. Misalnya, waktu pertemuan atau konsultasi sering tidak sesuai dengan jadwal kerja para

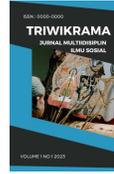


nelayan, sehingga mereka jarang terlibat dalam diskusi penting tentang aturan yang akan berdampak langsung pada hidup mereka. Akibatnya, kebijakan konservasi yang diterapkan sering kali dirasa asing oleh masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya kepatuhan dan munculnya konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat setempat (Tam, 2015).

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat lokal bukan hanya penting sebagai bentuk legitimasi kebijakan, tetapi juga sebagai strategi yang efektif untuk mencapai keseimbangan antara konservasi dan keberlanjutan ekonomi. Pendekatan konservasi berbasis masyarakat yang lebih inklusif dan partisipatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas kebijakan konservasi laut di Wakatobi. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan kebijakan lebih adaptif terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial lokal, yang pada gilirannya meningkatkan komitmen masyarakat dalam mendukung tujuan konservasi. Dalam hal ini, dialog yang lebih terbuka antara pemerintah, NGO, dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan memperhitungkan berbagai kepentingan yang ada di kawasan tersebut (Adimu et al., 2018).

Tidak hanya itu, ekowisata berbasis komunitas juga dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam konservasi laut, sekaligus menyediakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Wisata berbasis masyarakat yang melibatkan komunitas Bajo di Wakatobi memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan, sembari tetap menjaga kelestarian lingkungan laut (Marlina et al., 2020). Dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah, masyarakat Bajo dapat dilibatkan dalam pengelolaan destinasi ekowisata, yang tidak hanya akan meningkatkan taraf ekonomi mereka, tetapi juga memperkuat komitmen mereka terhadap pelestarian lingkungan laut. Namun, inisiatif ini perlu disertai dengan pendampingan dan pelatihan yang memadai, sehingga masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk mengelola pariwisata secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem laut.

Pariwisata bahari dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, tetapi diperlukan strategi kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa pengembangan ini selaras dengan upaya konservasi lingkungan (Yulius et al., 2016). Oleh karena itu, pengelolaan konservasi laut di Wakatobi harus lebih memperhatikan aspek kesenjangan antara kebijakan dan implementasi, serta pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses tersebut. Tanpa adanya partisipasi yang aktif dan integratif dari masyarakat setempat, kebijakan yang dirumuskan akan sulit untuk mencapai tujuan-tujuan konservasi yang diharapkan. Pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan serta adaptasi kebijakan terhadap kondisi sosial dan ekonomi setempat merupakan kunci keberhasilan konservasi di kawasan Cagar Biosfer Wakatobi.



5. KESIMPULAN

Sebagai Cagar Biosfer UNESCO, Wakatobi memiliki peran penting dalam konservasi laut global dan mencerminkan komitmen Indonesia terhadap pelestarian keanekaragaman hayati. Kawasan ini dikenal akan kekayaan ekosistemnya, termasuk terumbu karang yang terletak di Coral Triangle atau "Segitiga Terumbu Karang", namun tantangan implementasi kebijakan konservasi di Wakatobi terus mempengaruhi efektivitas upaya pelestarian ini. Meskipun kebijakan konservasi telah dirancang melalui zonasi dan aturan perlindungan, terdapat kesenjangan signifikan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Lemahnya koordinasi antarotoritas, kurangnya pengawasan, serta keterbatasan dalam keterlibatan masyarakat lokal, khususnya komunitas Bajo yang sangat bergantung pada sumber daya laut, mengakibatkan resistensi terhadap kebijakan yang dianggap membatasi tanpa memberikan alternatif kehidupan yang memadai. Kondisi ini menurunkan efektivitas konservasi dan berpotensi mengancam status UNESCO Wakatobi. Ketidakefektifan implementasi kebijakan konservasi laut di Wakatobi tidak serta-merta mencabut status UNESCO. Namun, kerusakan ekosistem dan kurangnya dukungan masyarakat dapat menurunkan kualitas manajemen kawasan hingga tidak lagi memenuhi standar UNESCO, yang berpotensi menempatkan status cagar biosfer Wakatobi dalam risiko jika tidak segera diperbaiki melalui penguatan koordinasi, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan Wakatobi sebagai kawasan konservasi. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dapat menjadi strategi utama untuk menjaga kelestarian ekosistem sambil mendukung ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimu, H., Boer, M., Yulianda, F., & Damar, A. (2018). Review management policy marine conservation area of Wakatobi National Park. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 176. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/176/1/012035>.
- Cuong, C. T., Brown, G., Phillips, M. R., & Schmidt, L. (2018). Building stakeholder awareness and engagement strategy in marine biosphere reserves. *Journal of Environmental Management*, 213, 123-130. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.01.023>
- Diyati, Ervina, & Faisyal, R. (2018). Upaya Masyarakat Wakatobi Dalam Menjadikan Taman Nasional Wakatobi Sebagai Cagar Biosfer Dunia Tahun 2012. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 5 (1), 1-14.
- Elliott, G., Mitchell, B., Wiltshire, B., Manan, I., & Wismer, S. (2001). Community Participation in Marine Protected Area Management: Wakatobi National Park, Sulawesi, Indonesia. *Coastal Management*, 29, 295-316. <https://doi.org/10.1080/089207501750475118>.
- Kemenvut. 2012. Informasi Taman Nasional Laut. Pola Grade. Jakarta

- Kenchington, R., & Agardy, T. (1990). Achieving marine conservation through UNESCO biosphere reserves. *Marine Policy Journal*, 14(4), 357-370. [https://doi.org/10.1016/0308-597X\(90\)90061-3](https://doi.org/10.1016/0308-597X(90)90061-3)
- Lynch, M., & Turner, S. (2021). Rocking the boat: intersectional resistance to marine conservation policies in Wakatobi National Park, Indonesia. *Gender, Place & Culture*, 29, 1376 - 1398. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2021.1971630>.
- Marlina, Sumarmi, Astina, I.K. (2020). SUSTAINABLE MARINE ECOTOURISM MANAGEMENT: A CASE OF MARINE RESOURCE CONSERVATION BASED ON LOCAL WISDOM OF BAJO MOLA COMMUNITY IN WAKATOBI NATIONAL PARK. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 32(4), 1317-1323. <https://doi.org/10.30892/gtg.32419-575>
- Nguyen, V. D., et al. (2020). What influences the wellbeing of UNESCO biosphere reserves? Lessons from international conservation programs. *Biosphere Reserve Research*, 5(2), 45-60.
- Rosenau, J. N. (1992). Governance, order, and change in world politics. In J. N. Rosenau & E. O. Czempiel (Eds.), *Governance without government: Order and change in world politics* (pp. 1-29). Cambridge University Press.
- Syukur, M. (2015). *Distribusi dan keragaman jenis lamun (Seagrass) serta status kelestarian ekosistem di Kabupaten Wakatobi*. Jurnal Ilmu Kelautan Indonesia.
- Tam, C. (2015). Timing exclusion and communicating time: A spatial analysis of participation failure in an Indonesian MPA. *Marine Policy*, 54, 122-129. <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2015.01.001>.
- UNESCO. (2023). *What are biosphere reserves?* Unesco.org. <https://www.unesco.org/en/mab/wnbr/about>
- Utomo, W. Y., (2012). Wakatobi Jadi Cagar Biosfer Dunia. <http://sains.kompas.com/read/2012/05/10/22210970/Wakatobi.Jadi.Cagar.Biosfer.Dunia>
- Yulius, Heriati, A., Salim, H., Purbani, D., & Ramdhan, M. (2015). POLICY MODEL ON MARINE TOURISM DEVELOPMENT IN WAKATOBI REGENCY (SE SULAWESI, INDONESIA)., 40, 85-93. <https://doi.org/10.14203/MRI.V40I2.64>.